

PENERAPAN NILAI PANCASILA DARI ARUS SEJARAH PERJUANGAN DAN DAMPAK GLOBALISASI

Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: maharanisartika@upi.edu dinieanggraenidewi@upi.edu

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perjuangan terbentuknya Pancasila yang harus diterapkan setiap nilainya dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis dampak globalisasi, peran negara dan maknanya tentang perwujudan nilai ideologi nasional warga negara Indonesia, dengan metode mempelajari literatur, mengamati, dan wawancara. Dari hasil data ditemukan bahwa globalisasi memiliki nilai yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan perilaku beberapa warga yang didukung konsistensi, kepercayaan diri dan penguatan peran pemerintah dalam menjaga nilai kesatuan. Selain itu, berdampak pula pada pengurangan penataran dan aktivitas yang mengarah pada perilaku yang menekankan pada emosi asli dan berdampak meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya ideologi nasional, meski sebenarnya tidak secara langsung mempercepat perwujudan nilai-nilai ideologi bangsa utama.

Kata Kunci : Globalisasi, Literatur, Konsistensi, Ideologi

ABSTRACT

This article aims to find out the history and struggle for the formation of Pancasila which must be applied to each of its values in everyday life and analyze the impact of globalization, the role of the state and its meaning regarding the embodiment of the national ideological values of Indonesian citizens, by studying literature, observing, and interviewing methods. From the data, it is found that globalization has a value that influences the thoughts, attitudes and behavior of some citizens which are supported by consistency, self-confidence and strengthening the role of government in maintaining the value of unity. In addition, it will also have an impact on reducing upgrading and activities that lead to behaviors that emphasize genuine emotions and have an impact on increasing citizen awareness of the importance of national ideology, although in fact it does not directly accelerate the realization of the ideological values of the main nation.

Keywords: Globalization, Literature, Consistency, Ideology

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan telah usang dikenal menjadi bagian pada nilai nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tadi dirumuskan menjadi dasar Negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali & dari berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup warga Indonesia. Sejak zaman dahulu, daerah-daerah pada nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh sang masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang

diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), adalah penyebab lahirnya negara. Munculnya pertarungan yang mendera Indonesia, menerangkan sudah tergerusnya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Putri 2020).

Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI dalam tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi jauh sebelum di sahkan nilai-nilai pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dimana nilai-nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan serta religius. Nilai-nilai yang terdapat lalu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu untuk memahami pancasila secara utuh dan kaitannya menggunakan jati diri bangsa Indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa Indonesia pada membangun suatu negara dan dijadikannya Pancasila menjadi dasar negara lantaran berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Hartianti 2017).

METODELOGI

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (library research). Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara kualitatif, dengan mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta menganalisis semua isinya yang sejalan dengan pokok bahasan yang akan diangkat, yaitu Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi. Keseluruhan data harus sejalan dengan tema penelitian yang telah diidentifikasi agar dapat dikumpulkan. Analisis data akan dilakukan untuk melakukan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Tahapan penelitian yang akan dilakukan meliputi: (1) mengumpulkan bahan penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) Membuat catatan penelitian, (4) Mengolah catatan penelitian, dan (5) Ringkasan Diskusikan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan dokumen karena Dokumen adalah rekaman peristiwa yang sah, baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun karya. Setelah semua dokumen terkumpul, penilaian yang sesuai akan dilakukan Menerapkan topik untuk menganalisis data berdasarkan topik yang dibahas oleh peneliti.

3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik analisis isi; menemati inti kesimpulan yang diambil dari suatu ide atau informasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan topik penelitian, (2) Analisis induktif; memilah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman sesuai dengan topik yang dibahas, dan (3) Mengurai konten deskriptif, metode ini menggunakan kontur analisis data yang ditemukan pada saat bersamaan sehingga dapat menjawab pertanyaan yang akan dibahas Itu untuk Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi

KAJIAN PUSTAKA

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri berdasarkan dua kata Sanskerta: panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua warga Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila merupakan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia, dan tercantum dalam paragraf ke-4 preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila saat ini ini cenderung sebagai lambang dan hanya sebagai formalitas yang dipaksakan kehadirannya di Indonesia. Kehadiran Pancasila dalam waktu ini bukan asal berdasarkan hati nurani bangsa Indonesia. Bukti berdasarkan tidak aplikatifnya sila-sila yang terkandung pada Pancasila di kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan realita yang ada pada masyarakat, pelaksanaan sila-sila Pancasila jauh berdasarkan harapan. Banyaknya kerusuhan yang berlatar belakang SARA (suku, ras, dan antargolongan), adanya pelecehan terhadap hak azasi manusia, gerakan separatis, luntarnya budaya musyawarah, serta ketidakadilan pada masyarakat menunjukkan tidak aplikatifnya Pancasila. Adanya hal misalnya ini menjauhkan harapan terbentuknya masyarakat yang sejahtera, aman, dan cerdas yang diidamkan melalui Pancasila. (Aminullah 2015)

Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila berdasarkan tahun 1945 sampai saat ini, Negara mengalami pengembangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi mengakibatkan bangsa hampir tidak mempunyai batas. Dampak baik dan buruknya globalisasi. Kondisi bangsa saat ini mencerminkan adanya penyimpangan berdasarkan Pancasila tidak sesuai dengan nilai seharusnya. Tetapi terdapat upaya pelurusan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila.

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia pada era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa tetap bisa menghayati dan mengamalkannya dan intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai panduan bangsa Indonesia sepanjang masa. (Asmaroini 2017)

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Sumber Historis Pancasila

Nilai ideal Pancasila sudah ada bagian dalam adat istiadat, kebudayaan, dan aliran yang bertumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, adab Ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi legalisasi tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam *of Philosophy* disebutkan sejumlah komponen yang terdapat dalam aliran, serupa kepercayaan kepada kekuatan supranatural, kontradiksi antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau anjuran serupa bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan identitas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep kehidupan di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.

b. Pancasila Sebagai Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1. Era Pra Kemerdekaan

Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang ke dua, tanggal 10 – 17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9 yang beranggotakan:

1. Ir. Soekarno (ketua)

2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada kongres tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi seperti berikut :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari alinea ke dua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sejumlah 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan melegitimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh utama pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa” adalah Muhammad Hatta yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama

Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan penggerak-penggerak Islam agar bersedia menerima usulannya demi mengempu persatuan bangsa. Teuku Mohammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun penggerak Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak hadir saat memenuhi usul Hatta. Penerimaan penggerak Islam itu mengambil rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI (Purwanta 2018).

2. Era Kemerdekaan

Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur, dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara (Somantri, 2006). Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya dimana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada zaman itu, presiden dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik (Somantri, 2006). Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia dimana partai komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Suharto atas Indonesia. Ini menemukan kurun awal orde baru dimana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa negeri presiden Soeharto kemudia menjadicore-values (Somantri, 2006), akhirnya kembali menodai ideal-ideal dasar yang sesungguhnya tertera dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan presiden Suharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi (Kasbal 2017).

3. Era Orde Lama

Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial-budaya berpusat di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda.

Pada periode tahun 1945 sampai pakai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial, namun bagian dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan pakai munculnya upaya-cara untuk mengganti Pancasila

seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, terdapat juga DI/TII yang ingin mendirikan negara berlandaskan ajaran Islam.

Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal, yang dekat kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Pada periode tahun 1956 kait tambah 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui 'Dekrit Presiden'. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis, yang terbukti tidak cocok dengan konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya dekadensi moral di masyarakat yang tidak lagi jiwa bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam menjelmakan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau memusatkan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya.

Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama (Utama and Dewi 2018).

4. Era Orde Baru

Era Orde Baru bagian dalam sejarah republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.

Diera Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal.

5. Era Reformasi

Kata ‘reformasi’ secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang, membereskan ulang, membereskan ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perilaku baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam peluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pancasila.

Pancasila pada Era Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif terdapat tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata.

6. Penerapan Nilai Pancasila pada Dampak Globalisasi

Pancasila harus diaktualisasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran secara subjektif adalah penerapan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan baik realisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran ketaatan, turut kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengetahuan inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan suatu bentuk kegiatan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran ketentuan moral. Sehingga suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang lebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Lickona (Budimansyah, 2011:57) mengembangkan karakter yang baik (good character) yang di dalamnya berisi tiga dimensi nilai moral seperti berikut:

1. Wawasan Moral (Moral Knowing)
 - a. Kesadaran moral (Moral Awareness)
 - b. Wawasan nilai moral (Knowing moral values)
 - c. Kemampuan mengambil pandangan orang lain (Perspectivetaking)
 - d. Penalaran moral (Moral Reasoning)
 - e. Mengambil keputusan (Decision-making) Pemahaman diri sendiri (Self Knowledge)
1. Perasaan Moral
 - a. Kata hati atau nurani (Conscience)
 - b. Harapan diri sendiri (Self-esteem)
 - c. Merasakan diri orang lain (Empathy)
 - d. Cinta kebaikan (Loving the good)

- e. Kontrol diri (Self-control)
- f. Merasakan diri sendiri (Humility)
- 2. Perilaku Moral
 - a. Kompetensi (Competence)
 - b. Kemauan (Will)
 - c. Kebiasaan (Habit)

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari pemerintah kolonial Belanda atau Jepang. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan panjang berbagai golongan masyarakat Indonesia. Pada rapat BPUPKI mulai dibahas calon dasar yang diajukan negara merdeka. Usulan Kandidat Negara Dasar mengajukan secara bergantian: Ar. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Usulan calon dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno bernama "Pancasila". Usulan calon dasar negara yang diajukan pada sidang pertama BPUPKI selanjutnya akan dibahas pada sidang kedua oleh panitia sembilan negara perumus Pancasila Piagam Jakarta. Sebelum Pancasila disahkan Panitia Sembilan, disarankan agar sila pertama diubah. Usulan itu disetujui, usulan tersebut disetujui, sehingga bunyi rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, UUD 1945 dan Pancasila oleh PPKI disahkan sebagai landasan negara Indonesia dan merupakan kesatuan negara multicultural (Brata and Wartha 2017).

Fungsi dan kedudukan Pancasila mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan. Kepercayaan terhadap pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Saat ini setelah reformasi terjadi selama 18 tahun kondisi bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kondisi perekonomian warga Indonesia bisa dikatakan masih di bawah standar. Angka pengangguran yang cukup tinggi penyebab salah satunya. Selain itu sistem pendidikan yang selalu berganti-ganti setiap ada pergantian Menteri Pendidikan semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia masih termasuk negara berkembang (Kristiono 2017).

Pengimplementasi Ideologi Pancasila masih kurang. Hal ini terlihat dari beberapa bidang kehidupan: a) bidang sosial psikologis generasi muda memiliki beberapa permasalahan yaitu mabuk-mabukan, bolos sekolah, trak-trakan di jalan raya. b) bidang sosial budaya memiliki beberapa permasalahan yaitu generasi muda berpakaian yang tidak pantas dengan umur. c) bidang sosial ekonomi memiliki beberapa permasalahan yaitu generasi muda susah mendapat pekerjaan, banyaknya pemudayang lulusan sarjana tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mengangur Bidang sosial politik memiliki permasalahan seperti dalam pemilihan umum banyak generasi muda dijadikan sasaran money politic dan dijadikan alat untuk memenangkan pemilihan umum oleh pihak yang bersangkutan (Muttaqin and Wahyun 2019).

Pancasila memiliki makna yang berbeda akan tetapi tetap satu, banyak ragam tetapi tetap mewujudkan persatuan. Seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tantular: "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa". Menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dari keanegaraman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Tan Hana Darma Mangrwa menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua, artinya hanya demi bangsa dan negara. Inilah

wujud loyalitas yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa". Loyalitas pada bangsa dan Negara Indonesia, rasa nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya Sri Edi Swasono mengatakan, bahwa apabila generasi muda di Indonesia tidak mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah airnya sendiri, tidak tahu sabang merauke dan keanekaragaman di dalamnya, maka ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tentang 2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai "Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15 - 40 tahun. Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam Pasal 7 dikemukakan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk bereksprei, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya (Widiyaningrum 2019).

Diagnosa terhadap ketahanan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP). Instrumen ini secara khusus didesain untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu IKIP juga bisa digunakan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai potensi pelemahan ideologi Pancasila di suatu daerah. Ketika potensi melemah dan pelemahan ideologi Pancasila terdeteksi secara dini maka berbagai hal yang mengarah pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia bisa segera tertangani dengan baik. Instrumen semacam ini sangat dibutuhkan Indonesia di tengah-tengah berkecamuknya proxy war di dunia. Pada level berikutnya pemangku kepentingan bisa menggunakan hasil pengukuran IKIP untuk menyusun program - kebijakan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

IKIP menjadi sangat penting mengingat persoalan ketahanan nasional dan ideologi semakin mengemuka. Kenyataan tersebut sesuai dengan kajian Mugasejati (1999) yang menyimpulkan bahwa sejak gelombang globalisasi melanda dunia, ruang lingkup permasalahan ketahanan nasional dan ideologi memasuki periode baru. Dalam tulisannya, "Agresivitas Amerika: Agenda Baru Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi", ia menyebutkan bahwa secara politik internasional, globalisasi tidak bekerja secara otomatis. Ada aktor yang secara sistematis berusaha menggerakkan globalisasi, baik pada tataran ideologi melalui publikasi atau penyebaran gagasan yang mengagungkan proses

globalisasi, maupun tataran politik melalui tekanan untuk liberalisasi ekonomi bagi negara-negara di dunia (Mugasejati, 1999: 39).

Ancaman terhadap ideologi tersebut dikemas melalui berbagai macam isu yang sering tidak disadar oleh suatu bangsa. Misalnya isu-isu demokratisasi, HAM, dan kelestarian lingkungan hidup di negaranegara berkembang. Salah satunya adalah tuntutan kelestarian hutan tropis di Indonesia. Sementara itu, negara-negara berkembang pada umumnya masih harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Seperti halnya Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi, serta adanya oknum-oknum yang tidak atau kurang memahami Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, semua itu merugikan kepentingan bangsa yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan (Suryosumarto, 1996: 61) (Maharani et al. 2019).

Selama ini tantangan yang dihadapi negara dalam konteks perwujudan nilai-nilai ideologi berbagai pemahaman yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti itu menimbulkan daya tarik dialektik dan harga diri warga negara. Warga negara akan dipengaruhi oleh faktor-faktor saat memilih berbagai nilai ini. Dalam dirinya juga termasuk pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai bersama keadaan lingkungan. Kondisi lingkungan termasuk masyarakat sekitar tempat mereka berinteraksi dan hasil dari membangun koneksi dengan dunia maya. Berbagai kecenderungan ditunjukkan oleh beberapa masyarakat yang pemikiran, sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Kemudian persatuan yang dibutuhkan dalam ideologi nasional akan diuraikan dan dirincikan sesuai dengan tatanan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.

Pertama, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai Sila Kesatu dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai spiritualitas Ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme/sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Spiritualitas sila Ketuhanan yang Maha Esa antara lain mengandung nilai dasar cita-cita kenegaraan dan nilai kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, dan negara dan dalam hal itu setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memeluk agama sesuai keimanan dan ketakwaan masing-masing (Kaelan, 2004, pp. 133–134). Sementara itu, komunisme/sosialisme merupakan paham yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai negara untuk kemakmuran secara merata (Nurwardani et al., 2016). Komunisme/sosialisme didasarkan pada sudut pandang materialisme dan terdapat ciri ateis karena manusia ditentukan oleh diri sendiri dan bukan terikat oleh kausalitas dengan Tuhan (Setijo, 2006). Sekularisme merupakan paham yang membedakan dan memisahkan antara agama dan negara (Kaelan, 2004, hal. 138). Teokrasi merupakan paham yang memandang antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan (Kaelan, 2004, hal. 137). Liberalisme adalah paham yang berkembang dari akar rasionalisme serta individualism yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kaelan, 2004, hal. 142).

Kedua, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kedua dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab versus fundamentalisme dan sektarian. Sila kedua ini antara lain mengandung nilai pengakuan atas hakikat kodrat manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dan dalam hal itu bangsa Indonesia mengakui sebagai bagian dari umat manusia. Pancasila mengandung nilai humanis (Sitorus, 2016). Tantangan aktualisasi nilai sila kedua adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan penghormatan atas martabat diri, dan juga hak untuk

beribadah sesuai keimanan seseorang termasuk nilai yang seharusnya dijamin. Era keterbukaan informasi sekarang ini dimaknai secara bebas tanpa batas, sehingga tercatat beberapa hasil dari perilaku perundungan, persekusi, dan menghujat orang.

Ketiga, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila ketiga Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai Persatuan Indonesia versus nilai hegemoni komunitas, dan pesimisme. Sila Ketiga ini mengandung nilai kebersamaan dengan keragaman dan terikat dalam kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka bernama Indonesia. Dalam hal itu dipahami keanekaragaman keindonesiaan meliputi manusia, keluarga, kelompok, golongan, suku bangsa, keragaman wilayah, namun menjadi satu kesatuan integral baik lahir maupun batin (Kaela, 2004, hal. 130). Sementara itu hegemoni sektarian/ komunitas adalah paham yang didasarkan pada pemikiran kelompok tertentu dengan label sebagai komunitas mayoritas memiliki keeksklusifan.

Keempat, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila keempat dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan versus nilai liberalism dan hegemoni sektarianisme. Sila keempat ini mengandung nilai penghormatan terhadap demokrasi disertai tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Tantangan aktualisasi nilai sila keempat terlihat dari praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang. Politik identitas adalah praktik demokrasi yang didasarkan pada sentiment primordial. Dalam berbagai kesempatan masih terlihat adanya elite politik yang mengajak masyarakat untuk memilih tokoh dengan dasar etnisitas seakan bila masyarakat memberikan hak pilih bukan dengan dasar itu terkesan demokrasi tidak berkeadilan. Pada perspektif tertentu, implementasi model ini termasuk sebagai pelaksanaan paham hegemoni sektarian/komunitas.

Kelima, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kelima dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia versus nilai kapitalisme, hedonisme, dan individualism. Sila Kelima ini mengandung nilai keadilan untuk mewujudkan hidup bersama baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tantangan aktualisasi nilai sila kelima, terlihat dari pola peran kaum pemilik modal dalam menguasai pasar sehingga masyarakat kelas bawah dengan nota bene bermodal kecil semakin terpinggirkan. Tantangan terhadap nilai ini juga ditunjukkan melalui perilaku hedonis sebagian masyarakat. Bergaya hidup boros menjadi bagian pelengkap dari perilaku hedonis tersebut (Silitonga 2020).

Pada hakikatnya kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pancasila dapat dijadikan salah satu upaya penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Misalnya pada kegiatan Training Kader Bangsa (TKD) dan Obade dimana pada prosesnya setiap peserta khususnya generasi muda dituntut untuk bersikap dan berkomitmen terhadap dasar negara yakni, Pancasila beserta seluruh aspek kajiannya, serta norma dan nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu dapat dilihat dari tujuan, visi dan misi Pusat Studi Pancasila yakni, mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup (*Developing Pancasila as a living truth*) dan pembudayaan Pancasila.

Penguatan tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus selalu dilakukan secara kontinuitas sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Yudohusodo (1995:17) mengemukakan bahwa: *Semangat dan wawasan kebangsaan*

menjadi penting untuk ditumbuhkembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta pada tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini (Afryand and Sapriya 2018).

Kesadaran akan moral dan norma yang ada tanpa harus dipaksa melakukannya, tetapi kesadaran yang ada dalam diri pribadi, demikian juga dengan masyarakat dapat mengsosialisasikan pemahaman akan nilai-nilai yang sudah mereka dapatkan selama belajar di sekolah, teori dan pembelajaran mengenai pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, sudah didapatkan, tetapi harus dipraktekkan oleh masyarakat agar terealisasi dan jelas dampak positif yang sudah diterima dan di pahami secara nyata.

Bentuk konkrit sangat jelas tidak hanya diamalkan dan dilaksanakan ditempat tinggal masyarakat ataupun di lingkungan, tetapi dalam skoop yang lebih luas lagi. Syarbaini (2011) menjelaskan relevansi pendidikan dari sila pertama sampai sila ke lima dapat direalisasikan dalam kegiatan tersebut, adanya keaktifan mahasiswa untuk ikut ambil alih tanpa disuruh dalam aktivitas tersebut (Eleanora and Sari 2019).

KESIMPULAN

Melihat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu untuk membuat pondasi negara agar kokoh membutuhkan pikiran yang kritis. Sejarah Pancasila dari era Pra Kemerdekaan hingga era reformasi menjadi salah satu perjuangan bahwa masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap negara yang sudah di perjuangkan selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusinya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semakin maju kehidupan masyarakat, semakin banyak ancaman salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi dengan segala risiko yang ditimbulkannya bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana tindak kekuasaan dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila.

SARAN

Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme tidak diimplementasikan sejak dini, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan selalu diterapkan dari hal yang paling kecil, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini contohnya dengan menghafal lima asas Pancasila dan menghafalkan lagu Indonesia Raya, dan memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryand, Anzhar Ishal, and Sapriya. 2018. "INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PUSAT STUDI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDEOLOGI BANGSA BAGI GENERASI MUDA (Studi Kasus Di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)." *Untirta Civic Education Journal* 3(2):164.

- Aminullah. 2015. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3(1):620–24.
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2017. "MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1(2):51.
- Brata, Ida Bagus, and Ida Bagus Nyoman Wartha. 2017. "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia." *Jurnal Santiaji Pendidikan* 7(1):132.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2019. "Relevansi Pendidikan Pancasila Dan Potret Mahasiswa Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Civic Hukum* 4(2):124. doi: 10.22219/jch.v4i2.9950.
- Hartianti, Uniqe. 2017. *PANCASILA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA D*.
- Kasbal, Indra Purnama. 2017. *Pancasila Era Kemerdekaan*.
- Kristiono, Natal. 2017. "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *Harmony* 2(2):194.
- Maharani, Septiana Dwiputri, Surono, Hadi Sutarmanto, and Ahmad Zubaidi. 2019. "Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25(2):278–79. doi: 10.22146/jkn.31823.
- Muttaqin, Zedi, and Wahyun. 2019. "Pemahaman Dan Implementasi Ideologi Pancasila Di Kalangan Generasi Muda." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 7(2):34.
- Purwanta, Hieronymus. 2018. "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia." *Jurnal Candi* 18(2):133–36.
- Putri, Laura Sandila. 2020. "PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA (Periode Pengusulan Pancasila)." 2.
- Silitonga, Tatar Bonar. 2020. "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17(1):18–22. doi: 10.21831/jc.v17i1.29271.
- Utama, Andrew Shandy, and Sandra Dewi. 2018. "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi."
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. 2019. "Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila Di Kalangan Generasi Muda : Kajian Teoritis." *Journal JISIPOL* 03(3):73.